1. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-W

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa

Provinsi Papua

Untuk Periode yang Berakhir

31 Desember 2016

Gedung Menara Tinggi,

Jl Permai No. 10

Jayapura, Papua 90000

**KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Papua, Januari 2017

Kepala,

Utami, MSc

NIP 1971 0901 199203 2 002

**DAFTAR ISI**

**TAR ISI**

Kata Pengantar x

Daftar Isi x

Pernyataan Tanggung Jawab x

Ringkasan x

1. Laporan Realisasi Anggaran x
2. Neraca x
3. Laporan Operasional x
4. Laporan Perubahan Ekuitas x
5. Catatan atas Laporan Keuangan x
6. Penjelasan Umum x
7. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran x
8. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca x
9. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional x
10. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas x
11. Pengungkapan Penting Lainnya x
12. Lampiran dan Daftar x

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA**

***GEDUNG MENARA TINGGI, JL PERMAI NO. 10, JAYAPURA, PAPUA***

***TELEPON 0967 5563265,5335234, FAXIMILE 096733081972***

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Papua, Januari 2017

Kepala,

Utami, MSc

NIP 1971 0901 199203 2 002

|  |  |
| --- | --- |
| **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN** | |
| Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:   1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**   Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.  Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp720.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp750.000.000.  Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp30.590.000.000 atau mencapai 98.36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp31.100.000.000.   1. **NERACA**   Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.308.685.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.653.485.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp248.450.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.782.750.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp624.000.000.  Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp437.160.000 dan Rp31.871.525.000.   1. **LAPORAN OPERASIONAL**   Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp912.530.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp19.670.030.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp18.757.500.000. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp16.000.000 dan Rp155.000.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp18.896.500.000   1. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp19.778.025.000 ditambah Defisit-LO sebesar Rp18.896.500.000 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.110.000.000 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp29.880.000.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp31.871.525.000.   1. **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.  Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. |

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

****

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**II. NERACA**

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA**

**NERACA**

**PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

****

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(*Dalam Rupiah*)



***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

****

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

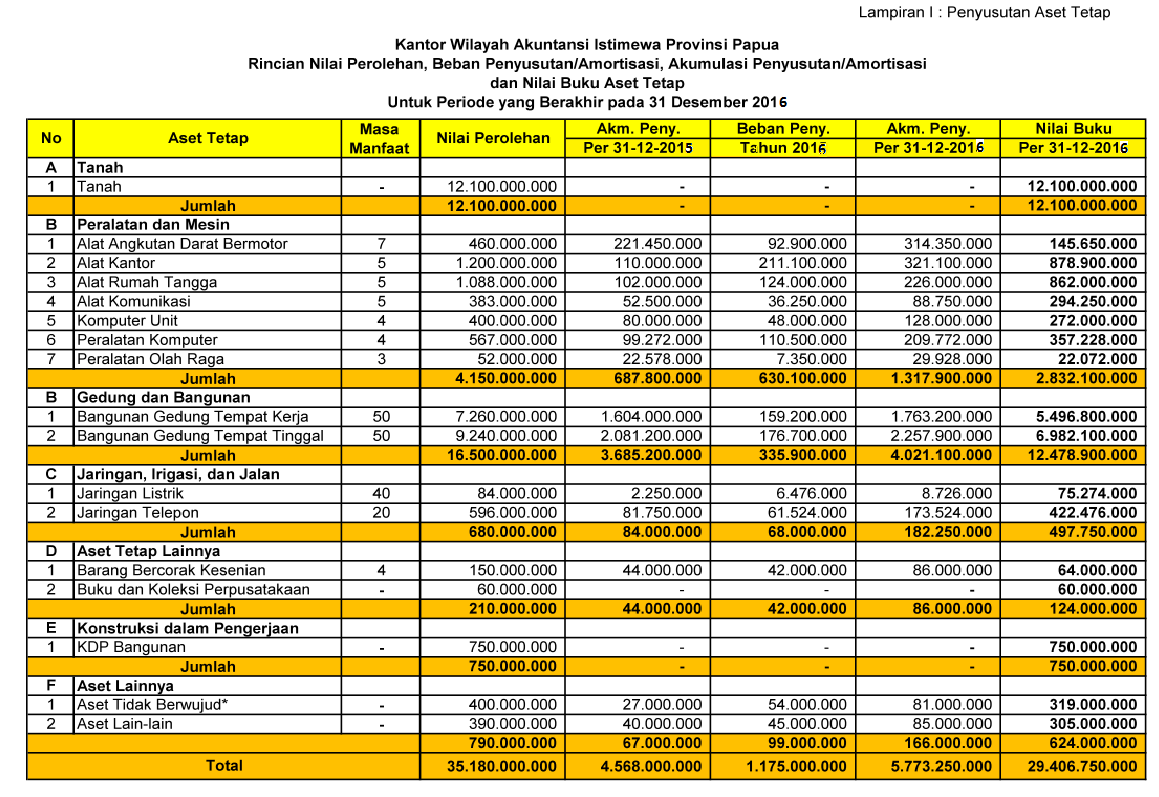
**V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **A. PENJELASAN UMUM** |
|  | **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua** |
| *Dasar Hukum Entitas dan*  *Rencana Strategis* | Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Papua. Melalui peran Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.  Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua berkomitmen dengan visi:  *“****mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.****”*  Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:   1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual. 2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan. 3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan. |
| *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan* | **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**  Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.  Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua Tahun 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.  Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah 5 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:  *Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Kode  Wil | Satker | Jumlah/Jenis Kewenangan | | | | Jumlah Satker | | KP | KD | DK | TP | | 1 | 2500 | Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Jayapura | **-** | 1 | - | - | 1 | | 2 | 2500 | Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura | - | 1 | - | - | 1 | | 3 | 2500 | Kantor Akuntansi Istimewa Biak | - | 1 | - | - | 1 | | 4 | 2500 | Kantor Akuntansi Istimewa Merauke | - | 1 | - | - | 1 | | 5 | 2500 | Kantor Akuntansi Istimewa Sorong | - | 1 | - | - | 1 | | 6 | 2500 | Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari | - | 1 | - | - | 1 | | **Jumlah** | | | **-** | **6** | - | - | **6** | |
| *Basis Akuntansi* | **A.3. Basis Akuntansi**  Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. |
| *Dasar Pengukuran* | **A.4. Dasar Pengukuran**  Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.  Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.  Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. |
| *Kebijakan Akuntansi* | **A.5. Kebijakan Akuntansi**  Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.  Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah sebagai berikut: |
| *Pendapatan-LRA* | 1. **Pendapatan- LRA**  * Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). * Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). * Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. |
| *Pendapatan-LO* | 1. **Pendapatan- LO**  * Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. * Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:   + Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan   + Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.   + Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan * Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). * Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. |
| *Belanja* | 1. **Belanja**  * Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. * Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. * Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). * Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. |
| *Beban* | 1. **Beban**  * Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. * Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. * Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. |
| *Aset* | 1. **Aset**   Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. |
| *Aset Lancar* | * 1. **Aset Lancar** * Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. * Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. * Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. * Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan | | Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% | | Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% | | Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% | | Macet | * + - 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% | | * + - 1. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN |  * Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. * Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. |
| *Aset Tetap* | * 1. **Aset Tetap** * Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. * Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. * Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:  1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); 2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); 3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  * Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. * Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. |
| *Penyusutan Aset Tetap* | * 1. **Penyusutan Aset Tetap** * Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. * Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:   1. Tanah   2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)   3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan * Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. * Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. * Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:   *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*   |  |  | | --- | --- | | **Kelompok Aset Tetap** | **Masa Manfaat** | | Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun | | Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun | | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun | | Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun | |
| *Piutang Jangka Panjang* | * 1. **Piutang Jangka Panjang** * Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. * Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. |
| *Aset Lainnya* | * 1. **Aset Lainnya**   + Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.   + Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. * Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:   *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*   |  |  | | --- | --- | | **Kelompok Aset Tak Berwujud** | **Masa Manfaat (tahun)** | | *Software* Komputer | 4 | | *Franchise* | 5 | | Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 | | Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 | | Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 | | Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 | | Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |  * + Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. |
| *Kewajiban* | 1. **Kewajiban**  * Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. * Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.  1. Kewajiban Jangka Pendek   Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.   1. Kewajiban Jangka Panjang   Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.   * Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. |
| *Ekuitas* | 1. **Ekuitas**   Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas |
|  | 1. **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN** |
|  | Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut: |
| *Realisasi Pendapatan Rp720.000.000* | B.1 PENDAPATAN  Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp720.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua berasal dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Jasa berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pelatihan akuntansi kepada masyarakat.  Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:  *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2016* |
|  | Realisasi Pendapatan Jasa TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 10.77% dibandingkan realisasi TA 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan jasa akuntansi sehubungan dengan kewajiban penerapan akuntansi berbasis akrual di tahun 2016. Selain itu terdapat kenaikan Pendapatan Lain-lain dari Rp63.000.000 menjadi Rp100.000.000 atau sebesar 58.73% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu. Hal ini berasal dari pendapatan jasa lembaga keuangan dan pengembalian belanja pegawai serta belanja lainnya.  *Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 201**5* |
| *Realisasi Belanja Negara Rp30.590.000.000* | **B.2. BELANJA** |
| Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp30.590.000.000 atau 98.36% dari anggaran belanja sebesar Rp31.100.000.000. Rincian anggaran danrealisasi belanja TA 2016 tersaji sebagai berikut: |
|  | *Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016* |
|  | Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: |
|  | Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 21.78% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain:  1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2016, 2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial. |
|  | *Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015* |
| *Belanja Pegawai Rp6.900.000.000* | ***B.3 Belanja Pegawai***  Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.900.000.000 dan Rp6.400.000.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.  Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 7.81 persen dari realisasi belanja TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:   1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang. 2. Penambahan remunerasi PNS. |
|  | *Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015* |
| *Belanja Barang Rp12.700.000.000* | ***B.4 Belanja Barang***  Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.700.000.000 dan Rp10.990.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan 2.83% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh biaya perjalanan dinas peserta diklat serta pengadaan perlengkapan untuk kegiatan peserta sepanjang tahun 2016.  *Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015* |
| *Belanja Modal Rp10.790.000.000* | ***B.5 Belanja Modal*** |
| Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.790.000.000 dan Rp6.220.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.  Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 73,47% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.  *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015* |
|  | ***B.5.1 Belanja Modal Tanah***  Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.900.000.000 dan Rp3.000.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 96.67 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.  *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 201**5* |
|  | ***B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin***  Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp2.200.000.000, mengalami kenaikan sebesar 46.67 persen bila dibandingkan dengan TA 2015 yaitu sebesar Rp1.500.000.000. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung. Adapun penambahan tersebut dalam rangka persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015.  *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015* |
|  | ***B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan***  Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.750.000.000 dan Rp1.050.000.000. Realisasi belanja gedung dan bangunan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 66,67 persen yang berasal dari penambahan ruang kelas baru dan gedung baru yang dikhususkan untuk pelatihan. Gedung ini berlokasi di Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura, Merauke, dan Manokwari.  *Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015* |
|  | ***B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan***  Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp580.000.000 dan Rp400.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi di semua satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Jayapura dalam rangka mendukung rencana strategis.  *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015* |
|  | ***B.5.5 Belanja Modal Lainnya***  Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp360.000.000 dan Rp270.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 33,33 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan pengadaan *software* pendapatan untuk implementasi akuntansi berbasis akrual di seluruh satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Jayapura. |
| *Belanja Bantuan Sosial Rp200.000.000* | ***B.6 Belanja Bantuan Sosial***  Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp140.000.000. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 42.86% dibandingkan TA 2015. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.  Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.  *Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial*  *TA 2016 dan 2015* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA** |
| *Kas di Bendahara Pengeluaran Rp20.000.000* | **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran** |
| Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:  *Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran* |
| *Kas di Bendahara Penerimaan Rp6.000.000* | **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan** |
| Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp6.000.000 dan Rp2.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.  *Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015* |
| *Kas Lainnya dan Setara Kas Rp80.000.000* | **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas** |
| Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp80.000.000. dan Rp18.000.000.  Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasadalah sebagai berikut:  *Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015* |
| *Piutang PNBP Rp120.000.000* | **C.4 Piutang PNBP** |
| Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp120.000.000. dan Rp110.000.000. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:  *Rincian Piutang PNBP TA 2016 dan 2015* |
| *Bagian Lancar TP/TGR Rp72.000.000* | **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** |
| Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp72.000.000 dan Rp48.000.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:  *Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015* |
| *Bagian Lancar TPA Rp24.000.000* | **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** |
| Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp24.000.000 dan Rp19.200.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:  *Rincian Bagian Lancar TPA TA 2016 dan 2015* |
| *Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp11.055.000* | **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar** |
| Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.055.000 dan Rp6.555.000. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  *Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar*  *TA 2016* |
| *Belanja Dibayar di Muka Rp454.540.000* | **C.8 Beban Dibayar di Muka** |
| Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp454.540.000 dan Rp400.000.000. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secarapenuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: |
|  | *Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015* |
| *Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp135.000.000* | **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**  Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp135.000.000. danRp153.850.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:  *Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015* |
| *Persediaan Rp.1.753.000.000* | **C.10 Persediaan** |
| Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp1.753.000.000 dan Rp1.200.000.000.  Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015*    Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp1.100.000 berada dalam dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan. |
| *Tagihan TP/TGR Rp164.000.000* | **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**  Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp164.000.000. dan Rp90.000.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR ) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TA 2016 dan 2015* |
| *Tagihan Penjualan Angsuran*  *Rp92.000.000* | **C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran**  Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp92.000.000 dan Rp50.400.000. Rincian TPA untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: |
| *Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp7.550.000* | **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang**  Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp7.550.000 dan Rp7.020.000.  Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:  *Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2016* |
| *Tanah Rp12.100.000.000* | **C.14 Tanah** |
| Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.100.000.000 dan Rp6.000.000.000.  Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:    Revaluasi atas tanah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2015. Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl.Matoa No. 17, Jayapura pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga. |
| *Peralatan dan Mesin Rp4.150.000.000* | **C.15 Peralatan dan Mesin** |
| Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.150.000.000 dan Rp2.100.000.000. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:    Mutasi tambah:   1. Pembelian komputer unit senilai Rp200.000.000. 2. Pengadaan alat angkutan darat bermotor senilai Rp1.550.000.000. 3. Hibah sebesar Rp372.215.000 merupakan hibah alat kantor dan rumah tangga yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST). 4. Transfer masuk berupa komputer unit dan peralatan komputer dari Kantor Pusat BAPK sebesar Rp175.000.000. 5. Reklasifikasi masuk berasal dari pengaktifan kembali alat angkutan darat bermotor yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.000.000. 6. Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp44.000.000.   Mutasi kurang:   1. Penghentian alat studio, komunikasi, dan pemancar dari penggunaannya sebesar Rp32.500.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain. 2. Penghapusan sebesar Rp308.715.000 berupa alat angkutan darat bermotor.   Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. |
| *Gedung dan Bangunan Rp16.500.000.000* | **C.16 Gedung dan Bangunan** |
| Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp16.500.000.000 dan Rp14.000.000.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:    Mutasi tambah:   1. Pembangunan gedung baru serta penambahan ruang kelas senilai Rp2.562.785.000. 2. Koreksi kurang sebesar Rp62.785.000 yang merupakan koreksi pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.   Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. |
| *Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp680.000.000* | **C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan** |
| Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp680.000.000 dan Rp100.000.000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.  Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:    Transaksi penambahan berupa penambahan jaringan teknologi informasi di seluruh wilayah Papua dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.  Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. |
| *Aset Tetap Lainnya Rp210.000.000* | **C.18 Aset Tetap Lainnya** |
| Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp210.000.000 dan Rp180.000.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:    Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. |
| *Konstruksi dalam Pengerjaan Rp750.000.000* | **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)** |
| Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp750.000.000. dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura dan Biak yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  *Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan* |
| *Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp5.607.250.000* | **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** |
| Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp5.607.250.000 dan Rp4.501.000.000. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.  *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap* |
| *Aset Tak Berwujud Rp400.000.000* | **C.21 Aset Tak Berwujud** |
| Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp400.000.000 dan Rp40.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:  *Rincian Aset Tak berwujud*  Mutasi:    Mutasi tambah:   * Pembelian berupa aplikasi penatausahaan PNBP senilai Rp200.000.000 * Penambahan fitur pada MOYB Accounting Profesional senilai Rp160.000.000. |
| *Aset Lain-Lain Rp390.000.000* | **C.22 Aset Lain-Lain** |
| Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp390.000.000 dan Rp220.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:    Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:   1. Reklasifikasi dari aset tetap berupa penghentian penggunaan alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp250.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain. 2. Pengurangan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.000.000. 3. Pengurangan berupa penghapusan sebesar Rp30.000.000. merupakan penghapusan kendaraan bermotor melalui penjualan.   Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini. |
| *Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp166.000.000* | **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya** |
| Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp166.000.000 dan Rp67.000.000. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:  *Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya*    Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. |
| *Uang Muka dari KPPN Rp20.000.000.* | **C.24 Uang Muka dari KPPN** |
| Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.  Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Kantor Akuntansi Istimewa adalah sebagai berikut:  *Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN* |
| *Utang kepada Pihak Ketiga Rp134.080.000* | **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga** |
| Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp134.080.000 dan Rp18.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  *Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga* |
| *Pendapatan Diterima di Muka Rp164.200.000* | **C.26 Pendapatan Diterima di Muka** |
| Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp164.200.000 dan Rp165.400.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:  *Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka* |
| *Beban yang Masih harus Dibayar Rp118.880.000* | **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**  Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp118.880.000 dan Rp188.450.000, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.  *Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan TA 2015* |
| *Ekuitas Rp31.871.525.000* | **C.28 Ekuitas** |
| Ekuitasper 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp31.871.525.000 dan Rp19.778.025.000. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. |

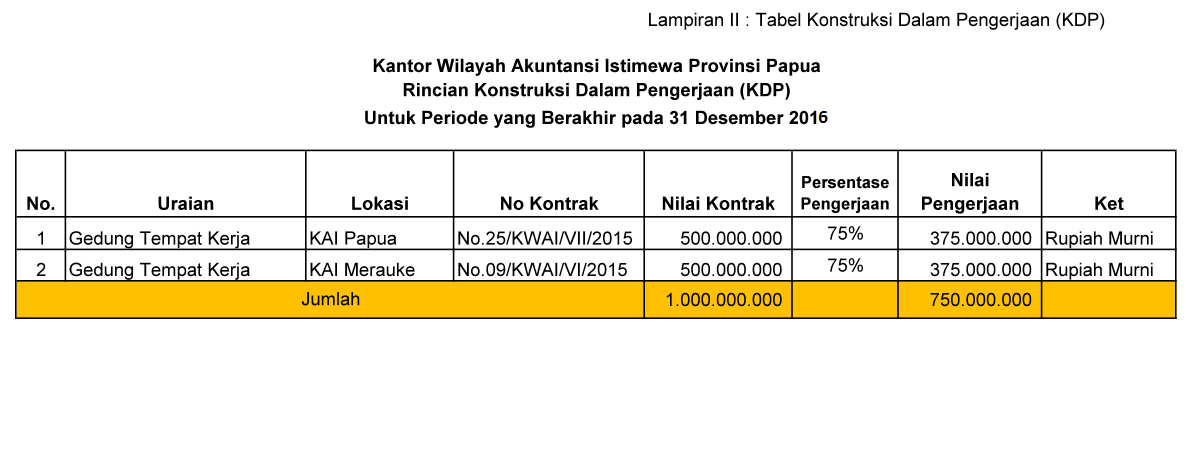
|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL** |
| *Pendapatan PNBP Rp912.530.000* | D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak  Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp912.530.000 dan Rp445.000.000. Pendapatan tersebut terdiri dari: |
|  | *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2016 dan 2015*  Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 2015. |
| *Beban Pegawai Rp6.940.000.000* | **D.2 Beban Pegawai**  Jumlah Beban Pegawai pada TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.940.000.000 dan Rp5.665.000.000. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. |
|  | *Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 201**5* |
| *Beban Persediaan Rp3.487.000.000* | **D.3 Beban Persediaan**  Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.487.000.000 dan Rp3.152.000.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 201**5* |
| *Beban Barang dan Jasa Rp1.924.000.000* | **D.4 Beban Barang dan Jasa**  Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.924.000.000 dan Rp1.542.100.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap,dengan rincian sebagai berikut:  *Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015* |
| *Beban Pemeliharaan Rp1.755.000.000* | **D.5 Beban Pemeliharaan**  Beban Pemeliharaan TA2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.755.000.000 dan Rp1.618.000.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 201**5* |
| *Beban Perjalanan Dinas Rp2.834.000.000* | **D.6 Beban Perjalanan Dinas**  Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.834.000.000 dan Rp2.781.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015* |
| *Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat*  *Rp1.350.000.000* | **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.350.000.000 dan Rp1.025.000.000. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Jayapura untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015* |
| *Beban Bantuan Sosial Rp200.000.000* | **D.8 Beban Bantuan Sosial**  Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp180.000.000. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015* |
| *Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.175.000.000* | **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**  Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.175.000.000 dan Rp736.400.000*.* Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan.Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi*  *TA 2016 dan 2015* |
| *Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp5.030.000* | **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**  Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.030.000 dan Rp4.010.000. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan 2015* |
| *Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp16.000.000* | **D.11 Kegiatan Non Operasional**  Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: |
|  | *Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015*  *\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)* |
| *Defisit Pos Luar Biasa Rp155.000.000* | **D.12 Defisit Pos Luar Biasa**  Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Pos Luar Biasa TA 2016 dan 2015*    Terdapat dua Kantor Akuntansi Istimewa yaitu Papua dan Merauke yang menyumbang nilai pada Pos Luar Biasa karena terjadi bencana longsor bukit dan banjir. Pendapatan PNBP di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana, sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana. |
|  | 1. **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS** |
| *Ekuitas Awal Rp19.778.025.000* | E.1 Ekuitas Awal  Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp19.778.025.000 dan Rp11.139.285.000. |
| *Defisit LO Rp18.896.500.000* | E.2 Surplus (Defisit) LO  Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar Rp18.896.500.000 dan Rp16.210.010.000. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. |
| *Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar*  *Rp0* | E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar  Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp0. |
| *Penyesuaian Nilai Aset*  *Rp0* | **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**  Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp250.000.000. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. |
| *Koreksi Nilai Persediaan Rp577.885.000* | **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**  Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp577.885.000 dan Rp458.750.000. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:  *Rincian Koreksi Nilai Persediaan* |
| *Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp450.000.000* | **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**  Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp450.000.000 dan Rp124.000.000. Selisih revaluasi aset tetap berasal dari penilaian ulang atas tanah di Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura. |
| *Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp35.000.000* | **E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**  Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp35.000.000 dan Rp82.000.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.  *Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016* |
| *Koreksi Lain-lain Rp117.115.000* | **E.3.6 Koreksi Lain-lain**  Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp117.115.000 dan Rp184.000.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:  *Rincian Koreksi Lain-Lain* |
| *Transaksi Antar Entitas Rp29.880.000.000*  *Ekuitas Akhir Rp31.871.525.000* | E.4 Transaksi Antar Entitas  Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp29.880.000.000 dan Rp23.750.000.000. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:  *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*    **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**  Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp720.000.000 sedangkan DKEL sebesar Rp30.590.000.000  **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**  Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.  Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp250.000.000 terdiri dari:    Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp70.000.000 yang merupakan transfer Persediaan ke KPPN Jayapura dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.  **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**  Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp170.000.000 dari total Rp450.000.000 yang diterima sepanjang tahun 2016.  Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0.  Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:  Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker Tahun 2016 disajikan pada lampiran.  E.5 Ekuitas Akhir  Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp31.871.525.000 dan Rp19.778.025.000. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.** |
|  | **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**  Pada tanggal 15 Januari 2017 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, Instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua telah membentuk tim untuk untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstrusikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder.* |
|  | **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**  Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 009/BALAP.5/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 018/BALAP.5/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua pada tanggal 05 Juli 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut: |



****

\*) Beban amortisasi



Lampiran III: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

**